



BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan berkaitan dengan pengadaan sumber daya ekonomi dan bagaimana pemanfaatan serta penggunaannya secara efektif dan efisien dalam bisnis. Selain itu manajemen keuangan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajerial dalam pengambilan keputusan keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan manajemen yang berhubungan langsung dengan berbagai departemen fungsional seperti personalia, pemasaran dan produksi. Pengelolaan keuangan mencakup wilayah yang luas dengan pendekatan multidimensi. paramasivan & subramanian (2019)

Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan, salah hal yang perlu di perhatikan oleh perusahaan adalah nilai waktu dari uang (time value of money) dapat diartikan sebagai konsep yang menjabarkan bahwa uangan yang tersedia pada saat ini lebih berharga dibandingkan uang dalam jumlah sama yang tersedia di masa yang akan datang, semakin tinggi bunga seperti bunga deposit perbankan, maka nilai uang yang diterima saat ini akan semakin berharga.



2. Kinerja Keuangan

Kieso dan rekan-rekannya (2002, hlm. 3), sebagaimana dikutip dalam buku oleh Dr. Muhammad Idris Patarai (2017), menjelaskan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan penting kepada pihak di luar perusahaan. Laporan-laporan ini mencerminkan sejarah perusahaan yang diukur dalam satuan moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai format, seperti laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lain yang relevan, termasuk materi penjabaran yang merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBD dan dialokasikan untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Beberapa kabupaten dan kota di Pulau Jawa memperlihatkan tingkat kemandirian yang tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan bahkan melampaui 50%, yang menunjukkan semakin besarnya peran kegiatan ekonomi lokal dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Mardiasmo (2002:162) dalam buku DR. Muhammad Idris Patarai, (2017) tujuan umum laporan bagi organisasi pemerintah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi social dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship)
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, debt service coverage ratio, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jenis-jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



- 1) Rasio Efektivitas, Menurut Handayani et al. dalam Listari et al. (2022), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila tujuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut efektif.
- 2) Rasio Efisiensi, Menurut Widodo dalam Listari et al. (2022) mengatakan efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumusan efisien yang akan dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah. tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja.
- 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini juga mencerminkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan pinjaman dari pihak eksternal. Semakin besar proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil pula tingkat ketergantungan terhadap

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



transfer dari pemerintah pusat maupun sumber dana lain di luar daerah (Halim, 2012).

- 4) Rasio Keserasian merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah membagi dan memprioritaskan alokasi belanja antara belanja rutin serta belanja pembangunan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana komposisi anggaran difokuskan pada kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pengeluaran rutin yang bersifat administratif. Semakin besar porsi belanja pembangunan, maka semakin baik arah penggunaan anggaran karena dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sebaliknya, jika belanja rutin lebih dominan, maka ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas untuk mendukung program pembangunan (Halim, 2012).
- 5) Rasio Pertumbuhan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai apakah kinerja pemerintah daerah pada suatu tahun anggaran tertentu maupun dalam periode beberapa tahun menunjukkan adanya peningkatan atau justru stagnasi. Indikator ini membantu melihat perkembangan capaian kinerja dari waktu ke waktu (Mahmudi, 2016 dalam Irnawati et al., 2023).

3. laporan keuangan

Menurut Peraturan BPK Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan



keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan Arus Kas Pembuatan laporan keuangan pemda dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD-SKPD. Laporan keuangan pemda terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:

-Semester, yang mencakup periode Januari-Juni

-Tahunan, yang mencakup periode Januari-Desember

Berbeda halnya dengan Laporan Keuangan Perusahaan, Kelengkapan penyajian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan serta kebijakan manajemen dalam menyusunnya.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Selain itu, laporan keuangan juga disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan dalam memenuhi kepentingan berbagai pihak terkait. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang biasa disusun perusahaan untuk menggambarkan berbagai aspek keuangan, seperti:

a. Laporan Laba Rugi

Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba atau mengalami kerugian selama periode tertentu biasanya satu tahun

b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi, yang menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan dari tiga jenis aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia 2021).

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu, termasuk laba ditahan, dividen, dan investasi tambahan dari pemilik.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



e. Catatan atas Laporan Keuangan

Memberikan penjelasan detail mengenai kebijakan akuntansi, asumsi, dan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan lainnya, seperti rincian aset tetap, kewajiban dan perubahan kebijakan akuntansi.

4. Analisis Kinerja Keuangan Dserah

Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mencakup pengukuran terhadap rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian, serta pertumbuhan keuangan desa. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan desa lebih terukur dan berkelanjutan.

5. Rasio Pengukur Kinerja Keuangan

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Semakin tinggi rasio yang dicapai, semakin menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada. Dengan



kata lain, rasio ini menjadi indikator sejauh mana rencana penerimaan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara nyata.

Untuk memperoleh nilai rasio efektivitas, realisasi pendapatan yang diterima desa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila realisasi pendapatan mendekati atau bahkan melebihi target, maka efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat dikategorikan baik. Sebaliknya, jika realisasi jauh di bawah target, hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan pendapatan desa belum berjalan secara optimal.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan belanja desa dengan target belanja desa yang ditetapkan. Kinerja pemerintah desa akan dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% - 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif



60%-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996)

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi pada dasarnya mengacu pada pencapaian output yang maksimal dengan penggunaan input tertentu. Konsep ini menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan. Dalam konteks Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri, efisiensi diukur melalui rasio antara biaya belanja yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dengan pendapatan yang diperoleh. Prinsip dasarnya, semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dengan demikian, ukuran efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana kombinasi input dimanfaatkan secara optimal, baik dalam menghasilkan output tertentu dengan biaya minimal, maupun dalam menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama. Kinerja pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio berada pada kisaran 60,01% hingga 80%. Semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang semakin baik, sebaliknya semakin tinggi rasio menandakan kinerja yang kurang optimal (Samosir, 2021).



Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi (%)	Persentasi Efisiensi
>100 %	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisiensi
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: (kepmendagri no.690.900.327 tahun 1996)

c. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal, dimana semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan secara mandiri. Sebaliknya, rasio kemandirian yang rendah menandakan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Dengan demikian, analisis rasio kemandirian menjadi penting dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal suatu daerah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan secara berkelanjutan

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan



wilayahnya secara mandiri, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah menunaikan kewajiban berupa pajak dan retribusi, yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat semakin berkurang, demikian pula sebaliknya. Halim (2012) dalam Tiyas Drastiana et al. (2021) menjelaskan bahwa untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan melalui perhitungan tertentu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007)

Tabel 2.3
Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Rasio (%)	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80% - 90%	Cuckup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004) dalam (Tiyas Drastiana et al. 2021)

6. Komponen dan Jenis Laporan Keuangan

Menurut Apriani (2021), tujuan utama dari komponen laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan serta sebagai dasar dalam menilai akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan dalam



menentukan keputusan ekonomi, tetapi juga berfungsi dalam mendukung keputusan sosial maupun politik. Salah satu komponen penting laporan keuangan pemerintah daerah adalah **Laporan Realisasi Anggaran**, yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dalam suatu periode. Data yang disajikan kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini terdiri dari enam elemen utama, yaitu:

a. **Pendapatan**

Pendapatan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah

b. **Belanja**

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

c. **Transfer**

Transfer merupakan pengeluaran dari satu entitas pelaporan kepada entitas lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, transfer termasuk dalam bagian belanja pemerintah daerah

d. **Surplus/Defisit**

Surplus menggambarkan kelebihan pendapatan dibandingkan belanja dalam satu periode anggaran, sedangkan defisit



menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu pendapatan lebih kecil daripada belanja.

e. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.

F. Silpa/Sikpa

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu periode anggaran.

7. Tujuan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang disusun memiliki maksud serta fungsi tertentu. Secara praktis, laporan keuangan dirancang untuk memenuhi sejumlah tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan pemilik maupun manajemen perusahaan. Menurut Kasmir (2018) dalam Syaharman (2021), tujuan penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai jenis dan nilai aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu.
- b. Menyajikan data tentang jenis serta jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
- c. Memberikan gambaran mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam periode tertentu.



- d. Menyampaikan informasi terkait jumlah serta jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode berjalan.
- e. Menunjukkan perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Menilai kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- g. Menyediakan catatan tambahan yang melengkapi laporan keuangan.
- h. Memberikan informasi keuangan lainnya yang relevan.

8. Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan daerah memiliki peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh terkait pengelolaan keuangan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai pihak pengelola maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat. Dengan analisis ini, pihak-pihak yang berkepentingan, seperti legislatif, eksekutif, dan masyarakat, dapat memahami lebih dalam mengenai kinerja keuangan daerah, termasuk tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Manfaat dari analisis laporan keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2013) dalam Fauzan et al. (2023) Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh melalui analisis laporan keuangan daerah

Analisis laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat yang tidak dapat diperoleh hanya dari laporan keuangan biasa. Pertama, analisis ini mampu menyajikan informasi yang lebih luas dan



mendalam dibandingkan data keuangan standar. Kedua, melalui analisis dapat digali berbagai informasi tersembunyi yang tidak langsung terlihat pada laporan keuangan. Ketiga, analisis membantu mengidentifikasi adanya kesalahan yang mungkin terkandung dalam penyajian laporan. Keempat, analisis juga berfungsi mengungkap ketidakkonsistenan, baik di dalam komponen laporan keuangan itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan informasi eksternal perusahaan.

Selain itu, analisis laporan keuangan dapat mengungkap sifat hubungan antar variabel yang pada akhirnya melahirkan model dan teori yang bermanfaat di lapangan. Hasil analisis juga menyediakan informasi penting yang dibutuhkan pengambil keputusan. Lebih jauh lagi, analisis memungkinkan penentuan peringkat perusahaan berdasarkan kriteria tertentu yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, serta memberikan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dengan periode sebelumnya maupun dengan perusahaan lain.

Manfaat lainnya adalah kemampuan analisis untuk memahami situasi keuangan yang sedang dihadapi perusahaan serta memprediksi potensi atau kemungkinan yang akan dialami di masa mendatang. Dengan demikian, analisis laporan keuangan tidak hanya membantu memahami kondisi saat ini, tetapi juga menjadi alat untuk merancang strategi di masa depan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



9. Analisis Laporan Keuangan APBDesa

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) dalam Hikmah et al. (2023), kepala desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan masyarakat. Laporan tersebut terdiri atas laporan tengah tahunan dan tahunan yang disampaikan kepada bupati atau walikota, sementara sebagian di antaranya juga disampaikan kepada BPD. Adapun jenis laporan yang harus dibuat mencakup: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Analisis laporan keuangan adalah proses menguraikan informasi dari berbagai pos laporan keuangan menjadi data yang lebih sederhana dan terfokus, sehingga memungkinkan untuk melihat hubungan signifikan antara pos-pos tersebut Trianto, (2017) dalam Putri et al., (2018). Sementara itu, menurut Heri (2016) dalam Putri et al., (2018). analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan penting antar elemen laporan keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk menilai kondisi serta kinerja keuangan

10. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut



Suparmoko (2002) dalam Tiyas Drastiana & Risdiana Himmati (2021), otonomi daerah adalah hak yang dimiliki daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola kepentingan masyarakatnya dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya lokal, sekaligus menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

11. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumiati (2018), **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)** merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas bersama dan disetujui oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. APBDesa terdiri atas unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mendefinisikan APBDesa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sementara itu, Pasal 8 peraturan yang sama menegaskan bahwa APBDesa mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.



Lebih lanjut, Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan APBDesa berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat desa. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 1 ayat (4), kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah dengan aktivitas utama di bidang pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, yang berfungsi sebagai tempat permukiman masyarakat desa, pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang /Tahun/Judul/identitas jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis Variabel
1	(Tiyas Drastiana et al. 2021) Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 20192020 Volume 1, Isu 1, November 2021, ISSN: 2808-7089 (Online), doi: 10.21274 SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu	Rasio Kemandirian(X1) Rasio Efektifitas (X2) Rasio Efisiensi (X3) Rasio Pertumbuhan (X4) Kinerja Keuangan(Y) Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif melalui data sekunder dari laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang /Tahun/Judul/identitas jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis Variabel
	Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam	Tengah periode 2019-2020.
2	(Atmaja et al. 2023) Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Wilayah Mataraman Tahun 2019- 2020 Volume 3, Isu 1, Tahun 2023, ISSN: 28087089 (Online), doi: 10.21274 Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)	Rasio Kemandirian(X1) Rasio efektivitas (X2) Rasio Efisiensi(X3) Kinerja Keuangan (Y) Data yang yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling
3	(Hikmah et al., 2023) Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021 MASMAn: Master Manajemen Vol.1, No.4 November 2023 e-ISSN: 3025-7433; pISSN: 30257441, Hal 1326	Rasio Efektivitas(X1) Rasio Efisiensi (X2) Dan Rasio Pertumbuhan(X3) Kinerja Keuangan (Y) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angkaangka yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBDes pada tahun 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series.
4	(Diana et al. 2024) Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 20172021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Multidisciplina ry Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 4 (2024): Vol. 1 No. 4 Edisi Oktober 2024	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah(X1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah(X2) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah(X3) Kinerja Keuangan(Y) Jenis Data yang digunakan berbentuk Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan.
5	(Via Vitaloka et al. 2024) Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio Pertumbuhan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang) Volume 1 No. 8 2024, 737 - 751 DOI: 10.62335 Jurnal Riset Ilmiah https://mangga.lajournal.org/in dex.php/SINE RGI E-ISSN 3031-3947	Rasio Efektifitas (X1) Dan Rasio Pertumbuhan (X2) Kinerja Keuangan(Y) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angkaangka dari Laporan Keuangan ADD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahun 2019-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan



No	Nama Pengarang /Tahun/Judul/identitas jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis Variabel
		dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif

Sumber : jurnal riset ilmiah

C. Kerangka Pemikiran

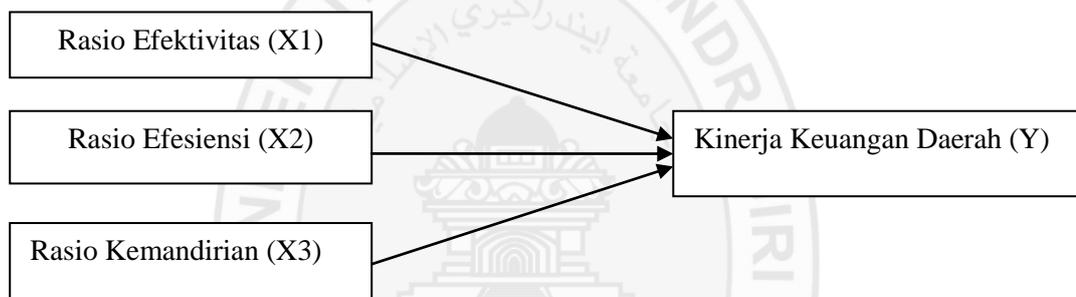
Evaluasi kinerja keuangan daerah dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang disusun secara periodik. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah mampu mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Sementara itu, rasio efisiensi menjadi indikator penting lainnya yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dengan baik, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan dan hasil yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

Selain itu, rasio kemandirian juga menjadi aspek krusial dalam menilai kinerja keuangan daerah, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan operasionalnya tanpa bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal serta sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi dalam struktur keuangan daerah.

Ketiga rasio tersebut—efektivitas, efisiensi, dan kemandirian—memiliki peranan besar dalam menentukan kualitas kinerja keuangan suatu

organisasi. Analisis rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Indragiri, pada periode tahun 2022-2024, guna memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas pengelolaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, serta tingkat kemandirian dalam pembiayaan operasional desa. Berikut kerangka

pemikiran dari penelitian ini:



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jawaban ini bersifat sementara karena didasarkan pada fakta-fakta empiris yang akan dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban teoritis yang diberikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, namun belum teruji secara empiris, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono, (2019). Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



H1: Diduga Kinerja keuangan Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala indragiri Periode Tahun 2022-2024 sudah Efektif dilihat dari Rasio Efektivitas

H2: Diduga Kinerja keuangan Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala indragiri Periode Tahun 2022-2024 sudah Efisien dilihat dari Rasio Efisiensi

H3: Diduga Kinerja keuangan Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala indragiri Periode Tahun 2022-2024 belum Mandiri dilihat dari Rasio Kemandirian

E. Variabel Penelitian

1. Konsep Operasional Variabel

a. Variabel Independen

Variabel independen, atau variabel bebas, adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono, (2017) variabel independen merupakan faktor yang menyebabkan perubahan atau kemunculan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian yang masing-masing dilambangkan dengan (X).

b. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018), variabel dependen atau variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, maupun konsekuensi. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Dalam



penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah, yang diberi simbol (Y).

Tabel 2.5
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel Penelitian	Pengertian	Rumus	Skala
1.	Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran tertentu.	1. Rasio efektifitas 2. Rasio efisiensi	Ratio
2.	Rasio Efektivitas (X1)	Efektivitas dapat diartikan sebagai keterkaitan antara output yang dihasilkan oleh suatu unit tanggung jawab dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila hasil yang dicapai mampu memenuhi sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$	Ratio
3.	Rasio	Rasio ini		Ratio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

No	Variabel Penelitian	Pengertian	Rumus	Skala
	Efisiensi (X2)	digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, yang kemudian dibandingkan dengan jumlah belanja daerah.	$REKD = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100$	
4.	Rasio Kemandirian (X3)	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bertumpu pada sumber utama pendapatan, yakni pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.	$\text{Rasio kemandirian PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{bantuan pemerintah pusat}} \times 100$	Ratio

Sumber : data oalahan 2025